

## UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MELALUI PELIBATAN PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### *DISASTER RISK REDUCTION EFFORTS THROUGH INVOLVEMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN INDONESIA: A LITERATURE REVIEW*

Hayatul Khairul Rahmat<sup>1\*</sup>, Ferra Puspito Sari<sup>2</sup>, Mutiara Hasanah<sup>3</sup>, Suandara Pratiwi<sup>2</sup>,  
Achmad Muafi Ikhsan<sup>4</sup>, R Rahmanisa<sup>2</sup>, Syahti Pernanda<sup>3</sup>, Adib Mahdi Fadil<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

#### Sejarah Artikel

Diterima: Oktober 2020

Disetujui: November  
2020

Dipublikasikan:  
November 2020

#### Abstract

*The disasters that occur not only have an impact on casualties and material damage and losses, but also raise the potential of the community to become persons with disabilities. Persons with disabilities in Indonesia are increasingly vulnerable because of the mismatch between disaster risk reduction efforts and the diverse needs of these groups. Therefore, it is very important to study disaster risk reduction efforts through the involvement of persons with disabilities in Indonesia to be more sensitive to the needs of each type of disability. This writing uses a library research method with a library approach. The involvement of persons with disabilities in disaster management activities will further ensure the fulfillment of the needs of persons with disabilities and their handling in the event of a disaster. However, it must be realized that the involvement of persons with disabilities in disaster management efforts is not an easy task, so it requires technical skills, knowledge and good faith from the parties involved. Mainstreaming of persons with disabilities in disaster risk reduction through effective programs and policies starting from the pre-disaster stage until after the disaster occurs according to the type of disability that exists.*

#### Kata Kunci

Pengurangan Risiko  
Bencana; Penyandang  
Disabilitas; Bencana  
Alam

#### Abstrak

Bencana yang terjadi tidak hanya berdampak pada korban jiwa serta kerusakan dan kerugian materil, tetapi juga mengangkat potensi masyarakat untuk menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas di Indonesia semakin rentan karena ketidaksesuaian antara upaya pengurangan risiko bencana dan kebutuhan yang beragam dari kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk

mengkaji upaya pengurangan risiko bencana melalui pelibatan penyandang disabilitas di Indonesia agar lebih peka terhadap kebutuhan setiap jenis disabilitas. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kepustakaan. Pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan penanggulangan bencana akan semakin menjamin pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dan penanganannya saat terjadi bencana. Namun harus disadari bahwa pelibatan penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana bukanlah tugas yang mudah, sehingga memerlukan keterampilan teknis, pengetahuan dan itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat. Pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana melalui program dan kebijakan yang efektif mulai dari tahap prabencana sampai setelah bencana terjadi sesuai dengan jenis disabilitas yang ada.

DOI:

10.33172/jmb.v6i2.623

e-ISSN: 2716-4462

© 2020 Published by Program Studi Manajemen Bencana  
Universitas Pertahanan, Bogor - Indonesia

**\*Corresponding Author:**

Hayatul Khairul Rahmat  
Email: hayatul.rahmat@idu.ac.id



## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang rawan akan bencana alam (Adri et al., 2020; Banjarnahor et al., 2020; Gustaman et al., 2020; Kodar et al., 2020). Kondisi tersebut membuat Indonesia dilanda oleh bencana alam yang datang silih berganti setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) yang dilansir pada laman [dibi.bnpb.go.id](http://dibi.bnpb.go.id) menyebutkan bahwa selama tahun 2019 mulai dari 1 Januari 2019 sampai 30 September 2019 terdapat 2.102 kejadian bencana alam di seluruh Indonesia. Intensitas kejadian yang paling banyak yaitu bencana puting beliung sebanyak 725 kali, bencana tanah longsor sebanyak 549 kali, bencana banjir sebanyak 549 kali, bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 248 kali, sisanya terbagi dalam bencana yang lain seperti bencana gempa bumi sebanyak 15 kali, bencana gelombang pasang/ abrasi sebanyak 7 kali, bencana banjir dan tanah longsor sebanyak 5 kali, dan bencana letusan gunung api sebanyak 4 kali (BNPB, 2019). Dari fenomena alam tersebut dapat membuktikan Indonesia adalah negara yang rawan akan bencana alam.

Berbagai bencana alam yang datang silih berganti tersebut dipengaruhi karena Indonesia terletak di antara zona subduksi atau pertemuan tiga lempeng tektonik yang

bertumbukan yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik (Priambodo et al., 2020; Pratikno et al., 2020; Rahmat & Alawiyah, 2020). Ketika salah satu dari lempeng tersebut bergerak, maka akan terjadi gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami di Indonesia (CFE-DMHA, 2015). Selain itu, Indonesia juga terletak di jalur gempa bumi dan gunung berapi yang dinilai paling dahsyat oleh *United States Geological Surveys* (Utomo & Minza, 2016). Jalur yang terkenal dengan nama *Pasific Ring of Fire* yang berbentang dari belahan bumi bagian barat tepatnya di Chile, kemudian melewati Jepang dan Asia Tenggara (Israel, 2010). Didukung juga posisi Indonesia yang berada di antara garis khatulistiwa dan beriklim tropis dengan dua musim berpotensi memunculkan berbagai bencana, seperti banjir, longsor, angin ribut, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan (Muhammad, 2013; Syarifah et al., 2020). Di samping memiliki ancaman bencana yang tinggi, Indonesia juga memiliki kerentanan yang tinggi terhadap risiko bencana. Kerentanan tersebut memiliki kerentanan yang bersifat fisik akibat pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek-aspek ketahanan dan keamanan terhadap ancaman bencana, dan kerentanan yang bersifat non fisik akibat sosial ekonomi yang kurang jelas (Maarif, 2013).

Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia (ILO, 2011). Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk dunia atau lebih dari satu miliar orang adalah penyandang disabilitas (The World Bank, 2016). Handicap Internasional (2016) menyebutkan penyandang disabilitas cenderung terpinggirkan dan tidak muncul dalam sistem sehingga terlewatkan dalam upaya penyelamatan dan evakuasi bencana. Fakta ini mendorong peneliti pada permasalahan bahwa rendahnya partisipasi dan kenampakan penyandang disabilitas bukan disebabkan oleh kedisabilitasannya yang dialaminya, melainkan ruang/ fasilitas/ pelayanan publik yang tidak didesain bagi mereka.

Menurut data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (dalam ILO, 2011) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 11.580.117 penduduk dan sebagian besar adalah korban dari peristiwa gempa bumi Jogja tahun 2006. Fenomena disabilitas dalam bencana tidak hanya ditemui dalam kasus gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006, tetapi juga pada kejadian jebolnya bendungan Way Ela di Desa Negeri Lima, Malu pada tahun 2013. Gambaran beberapa kasus di atas menunjukkan penyandang disabilitas pada dasarnya adalah kelompok yang sangat rentan terhadap bencana. Para penyandang disabilitas memiliki karakteristik dan kebutuhan yang dapat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Jika individu tanpa disabilitas saja merasakan dampak dan stress yang luar bisa akibat bencana, maka

bayangkan bagaimana tekanan yang dialami oleh penyandang disabilitas dengan keterbatasan yang telah dimiliki sejak awal.

Para penyandang disabilitas di Indonesia semakin rentan akibat tidak sesuainya antara upaya pengurangan risiko bencana dengan ragam kebutuhan kelompok tersebut. Tidak berpartisipasi dan diikuti sertakan penyandang disabilitas dalam upaya pengurangan risiko bencana membuat kesiapan yang belum sensitif terhadap kebutuhan tiap ragam disabilitas. Secara legalitas formal, isu penyandang disabilitas telah disebutkan sebagai salah satu kelompok rentan yang harus diprioritaskan dalam bencana. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol Opsional (United Nations, 2006) menyatakan bahwa perlindungan dan keamanan penyandang disabilitas dijamin dalam berbagai kondisi termasuk kebencanaan. Salah satu prinsip utama pengurangan risiko bencana dalam Kerangka Sendai Pengurangan Risiko Bencana bahwa agar semua upaya pengurangan risiko bencana harus terintegrasi dalam berbagai aspek seperti jenis kelamin, usia, disabilitas, dan perspektif budaya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana juga telah menyatakan bahwa penyandang disabilitas diprioritaskan dalam upaya penanggulangan bencana. Meski demikian, pada kenyataannya legislasi dan kebijakan ini masih belum selaras dengan upaya penanggulangan bencana yang dilaksanakan di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya pengurangan risiko bencana melalui pelibatan penyandang disabilitas di Indonesia secara kepustakaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Untuk itu, perlu mengkaji berbagai dokumen sehingga didapatkan hasil sesuai dengan tujuan dari penulisan artikel ini (Rahmat et al., 2020; Rahmat et al., 2018a; Rahmat et al., 2018b; Utama et al., 2002; Hakim et al., 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam perkembangannya secara global, sejak dikumandangkannya dekade internasional pengurangan bencana yang kemudian dilanjutkan dengan strategi internasional pengurangan bencana, maka muncullah istilah pengurangan risiko bencana. Istilah

pengurangan risiko bencana lebih memberikan pesan menguatkan penanggulangan bencana pada aspek antisipatif, preventif, dan mitigatif. Pengurangan risiko bencana merupakan sebuah kegiatan jangka panjang dan bagian dari pembangunan berkelanjutan (Rahma, 2018). Pengurangan risiko bencana merupakan konsep dan praktek dalam mengurangi dampak dari bencana yang akan terjadi melalui upaya-upaya dengan cara sistematis untuk menganalisis dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana (Pradika, Giyarsih & Hartono, 2018). Selain itu, menurut Twigg (2015) menjelaskan pengurangan risiko bencana adalah suatu penerapan kebijakan, strategi, dan praktek untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana di masyarakat yang berupa proses menggunakan pendekatan yang sistematis. Dari beberapa pengertian atau definisi di atas, maksud dari pengurangan risiko bencana adalah sebuah konsep yang dapat diimplementasikan sebagai upaya yang sistematis untuk mengurangi kerentanan bencana di masyarakat. Konsep pengurangan risiko bencana ini dipengaruhi oleh *Hyogo Framework Approach 2005-2015* yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada konferensi dunia kedua tentang pengurangan risiko bencana di Kobe, Jepang pada Januari 2005.

Penyandang disabilitas terdiri dari dua kata yaitu penyandang dan disabilitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) disebutkan penyandang adalah orang yang menyandang atau menderita sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *disability* yang berarti ketidakmampuan atau kecacatan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas sangat rentan ketika terjadi bencana. Kerentanan sosial ekonomi dan fisik membuat mereka lebih rentan terhadap bencana. Namun sayangnya, penyandang disabilitas cenderung terabaikan dalam sistem kesiapsiagaan dan registrasi darurat. Penyandang disabilitas seringkali tidak diikutsertakan dalam upaya kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Hal ini menyebabkan mereka kurang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang bencana dan cara penanggulangannya. Karena keterbatasan kemampuan fisik, bantuan mobilitas atau bantuan yang sesuai, penyandang disabilitas seringkali kekurangan bantuan dan layanan evakuasi, akses mudah, lokasi pengungsian yang baik, air dan sanitasi serta layanan lainnya. Kondisi emosional dan trauma akibat bencana saat situasi krisis terkadang berakibat fatal dan berjangka panjang bagi

penyandang disabilitas. Kesalahpahaman situasi dan masalah komunikasi membuat penyandang disabilitas lebih rentan pada saat bencana.

Pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan penanggulangan bencana menjadi penting karena mereka lebih mengetahui kebutuhan mereka sendiri. Penyandang disabilitas, meskipun merupakan kelompok rentan, berhak dan layak menjadi garda terdepan dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui pendekatan yang inklusif dan komprehensif untuk mengurangi kerentanan bencana. Perlu dicatat bahwa bencana alam memunculkan kelompok penyandang disabilitas, yaitu korban cedera atau malfungsi organ yang akan mengalami disabilitas jika tidak ditangani dengan baik; penyandang disabilitas sebelum bencana; dan orang-orang dengan gangguan fungsi organ sebelum bencana yang akan mengalami kecacatan jika akses dan infrastruktur kesehatannya rusak akibat bencana. Kelompok ini mengalami masalah yang hampir sama dalam situasi bencana, ketika fasilitas dan penanganan yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhannya sehingga penderitaan dan kerentanan yang dialami berlipat ganda jika dibandingkan dengan korban bencana lainnya. Penghormatan terhadap hak asasi penyandang disabilitas harus tercermin dalam semua aspek kehidupan, termasuk upaya penanggulangan bencana (Probosiwi, 2013).

Dalam menghadapi kerentanan fisik, banyak cara mudah dan murah yang bisa dilakukan. Pertama, dengan mengidentifikasi orangnya, jenis disabilitasnya, dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan risiko bencana. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas akan risiko yang mereka hadapi dan cara menghadapinya, meningkatkan keamanan rumah dan tempat kerja mereka, memindahkan mereka ke tempat yang aman jika terjadi bencana, dan memenuhi kebutuhan khusus mereka. setelah keadaan darurat. Dalam menghadapi bencana, metode yang digunakan terutama dalam mengkomunikasikan risiko dan sistem peringatan dini berbeda untuk setiap jenis kecacatan. Berdasarkan Handicap International (2005), spesifisitas dan kompleksitas setiap jenis disabilitas membuat penanganan dan kebutuhannya juga spesifik. Tabel 1 menunjukkan sistem peringatan yang disesuaikan dengan jenis disabilitas yang umum.

**Tabel 1.** Disabilitas dan Kaitannya dengan Sistem Peringatan Bencana

<b>Jenis Disabilitas</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>Sistem Peringatan Bencana</b>
Gangguan visual	a. Landmarks/ petunjuk b. Hand-rails c. Dukungan personal d. Pencahayaan yang baik e. Antrian yang	a. Sistem sinyal berbasis suara b. Pengumuman lisan c. Poster yang ditulis dengan huruf besar dan warna yang mencolok

Jenis Disabilitas	Kebutuhan	Sistem Peringatan Bencana
	terpisah	
Gangguan pendengaran	a. Alat bantu penglihatan b. Komunikasi dengan gambar c. Antrian terpisah	a. Sistem sinyal berbasis visual berupa simbol, bendera, dan sebagainya b. Gambar c. Sinyal kedip lampu
Gangguan fisik	a. Baju hangat/ selimut b. Kasur, tempat kering, dan alat higienis c. Dukungan personal d. Alat bantu e. Sarana publik yang telah dimodifikasi f. Antrian terpisah	a. Sistem sinyal berbasis suara b. Pengumuman lisan
Gangguan mental	a. Berbicara pelan b. Berbahasa yang sederhana c. Dukungan personal d. Antrian terpisah	a. Sinyal khusus berupa simbol, bendera, dan sebagainya b. Pengumuman yang jelas dan lengkap oleh tenaga siaga bencana

Sumber: Handicap International (2005).

Keterbatasan fisik menyebabkan mereka membutuhkan layanan atau fasilitas khusus yang mendukung mobilitas mereka pada saat terjadi bencana. Desain bangunan berbasis disabilitas sangat dibutuhkan pada gedung sekolah, perkantoran, rumah sakit, taman, jembatan dan jalan umum. Misalnya, dengan jalur khusus untuk pegangan tangan, menghindari jalan berundak, melengkapi jalan dengan petunjuk arah bagi penyandang *low vision* atau tunanetra. Pelatihan dan bimbingan untuk menangani penyandang disabilitas selama dan setelah bencana sangat penting di samping keterlibatan mereka dalam perencanaan persiapan dan upaya mitigasi bencana. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem dan proses penanggulangan bencana tentunya tidak dapat tercapai jika tidak ada kerjasama dan itikad baik dari semua pihak: masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Hal ini karena pemenuhan kebutuhan dan pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam tata pemerintahan yang baik membutuhkan koordinasi dari semua pihak. Mengubah pola pikir dan cara pandang terhadap penyandang disabilitas harus dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya dalam proses perencanaan pembangunan, pemetaan kebutuhan, dan pemecahan masalah dalam situasi apapun, termasuk situasi darurat bencana. Selain itu, upaya pemberdayaan

penyandang disabilitas juga diperlukan melalui peningkatan pengetahuan dan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, pemberian akses pekerjaan dan penghidupan yang layak, pemberian akses politik, dan sebagainya.

## **PENUTUP**

Sebagai kelompok yang paling rentan terhadap bencana, ternyata penyandang disabilitas tidak tertangani dengan baik karena minimnya pengetahuan tentang penanganan penyandang disabilitas saat atau setelah bencana, selain itu masih adanya anggapan yang meremehkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang kurang dan lemah. Keterbatasan akses mereka membuat mereka semakin sulit untuk berkembang dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kerentanan penyandang disabilitas menjadi masalah yang kompleks antara keterbatasan fisik, pengetahuan yang rendah, dan kemiskinan. Pelibatan penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana akan lebih menjamin pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dan penanganannya saat terjadi bencana. Namun harus disadari bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana tidaklah mudah. Dibutuhkan keterampilan teknis, pengetahuan dan niat baik dari pihak-pihak yang terlibat. Pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam semua aspek pelayanan sosial dan program pembangunan kesejahteraan sosial harus diwujudkan, tidak hanya dibicarakan. Pengarusutamaan tidak hanya soal pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga melalui program dan kebijakan yang efektif dari tahap prabencana hingga pascabencana sesuai dengan jenis atau jenis kecacatan yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adri, K., Rahmat, H. K., Ramadhani, R. M., Najib, A., & Priambodo, A. (2020). Analisis Penanggulangan Bencana Alam dan Natech Guna Membangun Ketangguhan Bencana dan Masyarakat Berkelanjutan di Jepang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 361-374.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2019). *Data Informasi Bencana Indonesia 2019*. Retrieved from <http://dibi.bnpb.go.id>, diakses pada 18 Desember 2019.
- Banjarnahor, J., Rahmat, H. K., & Sakti, S. S. (2020). Implementasi Sinergitas Lembaga Pemerintah untuk Mendukung Budaya Sadar Bencana di Kota Balikpapan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 448-461.
- CFE-DMHA. (2015). *Indonesia Disaster Management Reference Handbook*. Hawaii: Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance.

- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Gustaman, F. A. I., Rahmat, H. K., Banjarnahor, J., & Maarif, S. (2020). Peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung dalam Masa Tanggap Darurat Tsunami Selat Sunda Tahun 2018. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 462-469.
- Hakim, F. A., Banjarnahor, J., Purwanto, R. S., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Pengelolaan Obyek Pariwisata Menghadapi Potensi Bencana Di Balikpapan Sebagai Penyangga Ibukota Negara Baru. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 607-612.
- Handicap international. (2016). *Annual Report 2016 Handicap International Network*. Retrieved from [https://handicap-international.fr/sites/fr/files/documents/files/ra2016-hi-fed-en\\_0.pdf](https://handicap-international.fr/sites/fr/files/documents/files/ra2016-hi-fed-en_0.pdf), diakses pada 19 Desember 2019.
- International Labour Organization. (2011). *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Retrieved from [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_233426.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf), diakses pada 19 Desember 2019.
- Israel, B. (2010). *Indonesia's Explosive Geology Explained*. Retrieved from <http://www.livescience.com/8823-indonesia-explosive-geology-explained.html>., diakses pada 18 Desember 2019.
- Kodar, M. S., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Sinergitas Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Bencana Alam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 437-447.
- Maarif, S. (2013). *Pikiran dan Gagasan: Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Muhammad, A. (2013). *Prosiding Workshop Nasional Praktis Cerdas Adaptasi Perubahan Iklim*. Jakarta: Dewan Nasional Perubahan Iklim.
- Pradika, M. I., Giyarsih, S. R., & Hartono. Peran Pemuda dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 261-286.
- Pratikno, H., Rahmat, H. K., & Sumantri, S. H. (2020). Implementasi Cultural Resource Management dalam Mitigasi Bencana pada Cagar Budaya di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 427-436.
- Priambodo, A., Widyaningrum, N., & Rahmat, H. K. (2020). Strategi Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. *PERSPEKTIF*, 9(2), 307-313.
- Probosiwi, R. (2013). Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 4(2), 5-12.
- Rahma, A. (2018). Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Melalui Pendidikan Formal. *Viva Pendidikan*, 30 (1), pp. 1-11.

- Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 34-44.
- Rahmat, H. K., Nurmalasari, E., & Basri, A. S. H. (2018b). Implementasi Konseling Krisis Terintegrasi Sufi Healing Untuk Menangani Trauma Anak Usia Dini pada Situasi Krisis Pasca Bencana. *Prosiding Seminar Nasional PIT ke- 5 Riset Kebencanaan IABI 2018*, 671-678.
- Rahmat, H. K., Nurmalasari, E., & Falah, N. (2018a). Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Terinternalisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Underachiever. In *Prosiding Seminar Nasional Konvensi BK ke-XX & Kongres ABKIN ke-XIII*.
- Rahmat, H. K., Pratikno, H., Gustaman, F. A. I., & Dirhamsyah, D. (2020). Persepsi Risiko dan Kesiapsiagaan Rumah Tangga dalam Menghadapi Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 25-31.
- Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 398-407.
- The World Bank. (2016). *Disability Inclusion*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/topic/disability>, diakses pada 19 Desember 2019.
- Twigg, J. (2015). *Disaster Risk Reduction*. London: Humanitarian Policy Group.
- United Nation. (2006). *Preliminary Damage and Lost Assesment Yogyakarta and Central Java Natural Disaster*. Retrieved from <http://documents.worldbank.org/curated/en/581581468041086975/pdf/407120ENGLISH01507190Yogya01PUBLIC1.pdf>, diakses pada 19 Desember 2019
- Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas dalam pengurangan risiko bencana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 598-606.
- Utomo, M. H., & Minza, W. N. (2016). Perilaku Menolong Relawan Spontan Bencana Alam. *Gadjah Mada Journal of Psychology*, 2(1), 48-59.